



**PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
MELALUI PENGEMBANGAN POTENSI OBYEK WISATA
PANTAI PANGANDARAN DI KABUPATEN CIAMIS
JAWA BARAT**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Pada Universitas Negeri Semarang

Oleh

Nining Yuningsih

NIM. 3414000020

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN**

2005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada :

Hari :

Tanggal :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. S. Sri . Redjeki, M.Pd
Nip 130359493

Dra. Martitah, M. Hum
Nip 131570071

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan

Drs. Eko Handoyo, M. Si
Nip 131764048

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia ujian skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Senin

Tanggal : 7 Pebruari 2005

Penguji Skripsi

Drs. Sartono Sahlan
NIP 131125644

Anggota I

Anggota II

Dra. S. Sri. Redjeki, M.Pd
NIP 130359493

Dra. Martitah, M.Hum
NIP 131570071

Mengetahui
Dekan,

Drs. Sunardi
NIP 130367998

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Januari 2005

Nining Yuningsih
NIM 3414000020

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- Telah tampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar) (Qs Ar-Ruum : 41)

Persembahan :

Kupersembahkan karyaku ini untuk :

Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat
dan karunia-Nya

Kedua orang tuaku tersayang dan tercinta

Kakak-kakakku sekeluarga tercinta

Keponakan-keponakanku tersayang

Teman seperjuanganku angkatan 00

Almamaterku

PRAKATA

Puji syukur kupanjatkan kehadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pengembangan Potensi Obyek wisata Pantai Pangandaran di Kabupaten Ciamis Jawa Barat”.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dihadapi akan tetapi atas bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, semua hambatan yang penulis hadapi dapat teratasi. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini tidak lupa penulis sampaikan hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. D.R. H.A.T. Soegito, S.H., M.M., Rektor Universitas Negeri Semarang
2. Drs. Sunardi, Dekan Fakultas Ilmu Sosial
3. Drs. Eko Handoyo, M.Si., Ketua Jurusan hukum dan Kewarganegaraan
4. Dra. S. Sri. Redjeki, M.Pd., pembimbing I yang dengan sabar dan teliti memberikan bimbingan hingga selesainya skripsi ini
5. Dra. Martitah, M. Hum., pembimbing II yang telah dengan sabar dan teliti memberikan bimbingan hingga selesainya skripsi ini
6. Drs. H. Iing Syam Arifin, Kepala Dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Ciamis yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian
7. Segenap karyawan dan karyawan Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis yang telah membantu dalam penelitian skripsi ini

8. Bapak dan ibu serta keluarga dan sahabat yang telah memotivasi dan mendoakan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik
9. Semua pihak yang telah membantu hingga selesainya skripsi ini

Semarang, Januari 2005

Penulis

SARI

Nining Yuningsih 2005. *Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pengembangan Potensi Obyek Wisata Pantai Pangandaran Di Kabupaten Ciamis Jawa Barat*, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. 65 Halaman . 4 Tabel. 15 lampiran

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Pantai Pangandaran

Pendapatan Asli Daerah yang merupakan gambaran potensi keuangan daerah pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah. Berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, maka daerah dapat menggali potensi sumber daya alam yang berupa obyek wisata. Pemerintah menyadari bahwa sektor pariwisata bukanlah merupakan sektor penyumbang terbesar dalam pendapatan daerah, tetapi berpotensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu : (1) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Ciamis dalam rangka mengembangkan potensi obyek wisata pantai Pangandaran?; (2) Faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat dalam pengembangan potensi obyek wisata pantai Pangandaran?

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam mengembangkan obyek wisata pantai Pangandaran, untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan menghambat dalam pengembangan potensi obyek wisata pantai Pangandaran.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus dalam penelitian ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Ciamis dalam mengembangkan obyek wisata pantai Pangandaran dan faktor-faktor yang mendorong dan menghambat dalam pengembangan potensi obyek wisata pantai Pangandaran. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah informan dan dokumen di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan obyek wisata pantai Pangandaran di Kabupaten Ciamis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan analisis interaktif.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis dalam mengembangkan obyek wisata pantai Pangandaran adalah dengan membangun berbagai fasilitas wisata, promosi lewat media massa, maupun pameran wisata. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor yang mendorong pengembangan obyek wisata pantai Pangandaran adalah adanya daya tarik yang dimiliki oleh pantai Pangandaran, yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan faktor yang menghambatnya adalah adanya faktor internal, seperti sarana dan prasarana yang belum memadai, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia masih kurang, kurangnya kesadaran dari para pengusaha usaha jasa pariwisata dan masyarakat, terdapatnya lahan tidur, abrasi pesisir pantai, kurang tertibnya pedagang

kaki lima dan masih terbatasnya dana. Sedangkan faktor eksternal seperti adanya persaingan yang semakin ketat, krisis moneter, adanya pengaruh luar, kultur masyarakat yang kurang mendukung, kurangnya kesadaran wisatawan dan kurang sadarnya lembaga-lembaga swasta terhadap sarana dan prasarana kepariwisataan.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selaku pengelola adalah dengan cara memindahkan para pedagang kaki lima, membangun pancang dan dermaga penahan abrasi, rehabilitasi dan penanaman pohon baru, memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan pelaku usaha jasa pariwisata, dan memberikan Diklat kepegawaian kepariwisataan.

Saran Penelitian ini adalah : (1) Bagi pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam penggalian dan pengembangan potensi obyek wisata pantai Pangandaran hendaknya memperhatikan faktor fisik supaya tidak merusak keseimbangan alam; (2) Bagi pengelola obyek wisata pantai Pangandaran dalam mengelola obyek wisata pantai Pangandaran hendaknya lebih ditingkatkan keprofesionalannya seperti dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan sehingga dapat meningkatkan kualitas potensi daya tarik wisata; (3) Bagi wisatawan apabila mengunjungi obyek wisata hendaknya mematuhi peraturan dan himbauan yang ada di pantai Pangandaran.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA.....	vi
SARI.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi dan Pembatasan Masalah.....	4
1.3. Perumusan Masalah.....	5
1.4. Tujuan Penelitian.....	6
1.5. Kegunaan Penelitian.....	6
1.6. Sistematika Skripsi.....	7
BAB II TELAAH PUSTAKA	
2.1. Otonomi Daerah.....	8
2.2. Keuangan Daerah.....	10
2.3. Pendapatan Asli Daerah.....	12
2.3.1. Hasil Pajak Daerah.....	13
2.3.2. Hasil Retribusi Daerah.....	16
2.3.3. Perusahaan Daerah.....	16
2.3.4. Lain-lain Hasil Usaha Daerah Yang Sah.....	17
2.4. Obyek Wisata.....	18
2.4.1. Pengertian Obyek Wisata.....	18
2.4.2. Jenis Obyek Wisata.....	18

2.5. Pengembangan Obyek Wisata	19
2.6. Kerangka Berfikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Dasar Penelitian	31
3.2. Fokus Penelitian.....	31
3.3. Sumber data Penelitian	32
3.4. Alat dan Teknik Pengumpulan Data	33
3.5. Objektivitas dan Keabsahan Data.....	35
3.6. Metode Analisis Data.....	36
3.7. Prosedur Penelitian	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian	40
4.1.1. Gambaran umum hasil penelitian.....	40
4.2. Upaya Pemda dalam mengembangkan obyek wisata pantai Pangandaran	49
4.3. Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pengembangan obyek wisata pantai Pangandaran	54
4.3.1. Faktor yang mendorong	54
4.3.2. Faktor yang menghambat.....	56
4.4. Pembahasan.....	58
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Simpulan	64
5.2. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	67

DAFTAR TABEL

1. Pengunjung obyek wisata pantai Pangandaran tahun 1998 sampai tahun 2003	46
2. Pendapatan retribusi parkir obyek wisata pantai Pangandaran tahun 1998 sampai tahun 2003	47
3. Pendapatan Pendapatan obyek wisata pantai Pangandaran tahun 1998 sampai tahun 2003	48
4. Prosentase kontribusi pantai Pangandaran terhadap PAD tahun 1998 sampai tahun 2003	49

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman wawancara
2. Daftar nama informan
3. Bagan struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Ciamis
4. Dokumen
5. Visi, misi, strategi dan rencana operasional Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Ciamis Tahun 1998 sampai tahun 2003.....
6. Perencanaan strategis Kantor Dinas Pariwisata dan kebudayaan tahun
2004-2009
7. Peta wisata Kabupaten Ciamis
8. Dokumentasi Lokasi
9. Booklet obyek wisata di Kabupaten Ciamis
10. Jumlah pengunjung di Obyek wisata pantai Pangandaran tahun 1998
sampai tahun 2003
11. Jumlah hasil pendapatan dari pengunjung dan kendaraan parkir di obyek
wisata pantai Pangandaran tahun 1998 sampai tahun 2003
12. Surat permohonan izin penelitian
13. Surat rekomendasi KESBANGLINMAS Kabupaten Ciamis
14. Surat rekomendasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis
15. Surat keterangan telah melakukan penelitian

Daftar Nama Informan

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Acep Rustandi	Kasubdin ODTW
2	Mamat Surya Wijaya, S. Pd	Kasi Pengembangan Wisata
3	Hendra Gunawan	Kasi Hiburan dan Rekreasi
4	Ridwan Koswara	Pelaksana lapangan
5	Oyo Bin Dion	Pelaksana lapangan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menserasikan laju pertumbuhan antar daerah di Indonesia. Dalam pengembangan daerah sudah barang tentu dibutuhkan peningkatan pendayagunaan, potensi daerah secara optimal. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi yang diberikan kepada daerah Kabupaten dan Kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan serta sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dalam mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, sudah barang tentu daerah memerlukan biaya

yang cukup besar guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Oleh karena itu daerah diberi hak dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 yang mengatur sumber-sumber pendapatan daerah, yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu terdiri dari:
 - 1) Hasil pajak daerah
 - 2) Hasil retribusi daerah
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- b. Dana Perimbangan; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
(Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004)

PAD yang merupakan gambaran potensi keuangan daerah pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah. Berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, maka daerah dapat menggali potensi sumber daya alam yang berupa obyek wisata. Pemerintah menyadari bahwa sektor pariwisata bukanlah merupakan sektor penyumbang terbesar dalam pendapatan daerah, tetapi berpotensi dalam meningkatkan PAD. Untunglah di Indonesia ini masih mempunyai potensi alam dan seni budaya yang cukup besar yang dapat dimanfaatkan oleh daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dalam era globalisasi sekarang ini, bidang pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional. Sektor ini dicanangkan selain sebagai salah satu sumber penghasil devisa yang cukup andal, juga merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong perkembangan investasi. Untuk mengembangkan sektor ini pemerintah berusaha keras membuat rencana dan berbagai

kebijakan yang mendukung kearah kemajuan sektor ini. Salah satu kebijakan tersebut adalah menggali, menginventarisir dan mengembangkan obyek-obyek wisata yang ada sebagai daya tarik utama bagi wisatawan.

Pariwisata mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional, yaitu sebagai penghasil devisa, meratakan dan meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan, memperkuat persatuan, dan kesatuan, serta mengenal budaya bangsa. Seperti yang telah diamanatkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999, bahwa mengembangkan pariwisata, melalui pendekatan sistem yang utuh dan terpadu bersifat interdisipliner dan partisipatoris dengan menggunakan kriteria ekonomi, teknis, ergonomis, sosial budaya, hemat energi, melestarikan alam dan tidak merusak lingkungan. (TAP MPR No.IV/MPR/1999)

Dalam pembangunan kepariwisataan tetap dijaga terpeliharanya kepribadian bangsa dan kelestarian serta mutu lingkungan hidup. Pembangunan kepariwisataan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan sektor-sektor pembangunan lainnya serta antara berbagai usaha kepariwisataan yang kecil, menengah dan besar agar saling menunjang.

Kabupaten Ciamis mempunyai potensi di bidang pariwisata yang cukup besar untuk dikembangkan, dengan terdapatnya berbagai obyek wisata, baik obyek wisata alam maupun obyek wisata buatan. Mengingat obyek wisata yang ada dan potensinya yang cukup pesat dimasa mendatang. Dari beberapa obyek wisata yang ada di Kabupaten Ciamis, obyek wisata pantai Pangandaran merupakan taman wisata yang memiliki berbagai keistimewaan seperti pantainya landai dengan air yang jernih serta jarak antara pasang dan surut relatif lama sehingga memungkinkan kita untuk

berenang dengan aman, terdapat pantai dengan hamparan pasir putih dan terdapat taman laut dengan ikan-ikan dan kehidupan laut yang mempesona. dengan pemandangan alamnya yang sangat indah. Obyek wisata pantai Pangandaran sangat diharapkan dapat memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap PAD Kabupaten Ciamis. Tetapi keberadaan obyek wisata pantai Pangandaran ini akan kurang berdaya guna apabila pemerintah daerah Kabupaten Ciamis sebagai pihak pengelola tidak berupaya untuk mengelolanya dengan baik. Dalam hal ini terutama faktor-faktor penunjang obyek wisata seperti daya tarik, sarana dan prasarana serta promosi.

Dari penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang **Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pengembangan Potensi Obyek Wisata Pantai Pangandaran Di Kabupaten Ciamis-Jawa Barat.**

1.2. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Peningkatan merupakan sebuah proses perbuatan, cara meningkatkan usaha, kegiatan dan sebagainya (Poerwadarminta, 1988 : 951). Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Peningkatan dalam hal ini berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan potensi obyek wisata pantai Pangandaran di Kabupaten Ciamis Jawa Barat

Pangandaran merupakan primadona obyek wisata pantai di Jawa Barat, terletak di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran dengan jarak \pm 92 Km dari kota Ciamis kearah selatan.

Meskipun Pangandaran menjadi pundi emas bagi pemerintah Kabupaten Ciamis, tetapi penataan Pangandaran masih jauh dari memuaskan. Pedagang kaki lima masih bertebaran disana-sini sehingga mengotori dan mengurangi keindahan sekitar pantai. Fasilitas wisata yang tersedia di Pangandaran juga masih belum maksimal.

Namun demikian penelitian ini hanya membatasi pada upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Ciamis, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis.

1.3. Perumusan Permasalahan

Bertolak dari latar belakang yang dikemukakan diatas, maka secara khusus penelitian ingin menjawab beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Ciamis dalam rangka mengembangkan potensi obyek wisata pantai Pangandaran ?
2. Faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat dalam pengembangan potensi obyek wisata pantai Pangandaran?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ciamis dalam mengembangkan obyek wisata pantai Pangandaran.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan menghambat dalam pengembangan potensi obyek wisata pantai Pangandaran.

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1. Bersifat Teoritis

- a. Menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa dan pemerhati masalah Pendapatan Asli daerah dan pengembangan obyek wisata
- b. Memperoleh pengetahuan tentang potensi obyek wisata pantai Pangandaran dan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pengembangan obyek wisata pantai Pangandaran

1.5.2. Bersifat praktis

Memberi informasi kepada Pemda Kabupaten Ciamis dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pengembangan potensi obyek wisata pantai Pangandaran

1.6. Sistematika Skripsi

Skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu :

1.6.1. Bagian pendahuluan Skripsi

Bagian pendahuluan skripsi yang berisi tentang halaman judul, abstraks/sari, pengesahan, motto dan persembahan, prakata, daftar isi, daftar tabel dan daftar lampiran

1.6.2. Bagian Isi terdiri dari :

Bab I : Pendahuluan berisi tentang latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah, perumusan masalah atau fokus masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan skripsi

Bab II : Penelaahan kepustakaan dan kerangka berfikir yang membahas tentang : Otonomi Daerah, Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Obyek Wisata dan Pengembangan Obyek Wisata

Bab III : Metode penelitian membahas tentang dasar penelitian, fokus atau variabel penelitian, sumber data, alat dan pengumpulan data, objektivitas dan keabsahan data, model analisis data dan prosedur penelitian

Bab IV : Hasil penelitian dan pembahasan, membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Ciamis dalam mengembangkan potensi obyek wisata pantai Pangandaran, faktor-faktor yang mendorong dan menghambat dalam mengembangkan potensi obyek wisata pantai Pangandaran

Bab V : Penutup berisi tentang simpulan dan saran

1.6.3. Bagian akhir skripsi, berisi tentang daftar pustaka dan lampiran yang digunakan sebagai acuan untuk menyusun skripsi

BAB II

TELAAH PUSTAKA

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, sebagai landasan teori akan di bahas tentang: Otonomi Daerah, Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Obyek wisata, Pengembangan Obyek Wisata.

Adapun penjelasan mengenai landasan teori tersebut adalah sebagai berikut :

2.1. Otonomi Daerah

Otonomi Daerah berdasarkan pasal I huruf h UU No 22 Tahun 1999

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Otonomi Daerah berdasarkan pasal I poin 5 UU No. 32 Tahun 2004

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daerah sebagai badan hukum publik yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, mempunyai organisasi pemerintahan sendiri yang disebut pemerintahan daerah.

Menurut UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah bahwa daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU No. 22 Tahun 1999 pasal 1 poin 1)

Sedangkan menurut UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah bahwa daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU No. 32 Tahun 2004 pasal I poin 6)

Otonomi daerah kemudian membentuk suatu daerah yang disebut daerah otonom. Daerah otonom dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah seperti sekarang ini menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasar tugas, wewenang, dan

kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh , hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Otonomi daerah yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi juga harus menjamin keserasian hubungan antar Daerah dengan Daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Daerah. (Penjelasan Umum UU No. 32 Tahun 2004)

2.2. Keuangan Daerah

Keuangan daerah sangat dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Menurut penjelasan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yaitu penjelasan umum No. 8 menyebutkan bahwa: dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintah menjadi kewenangan daerah.

Di dalam UU No. 22 Tahun 1999 disebutkan bahwa :

1. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah

serta antara propinsi dan kabupaten atau kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintah daerah

2. Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah, kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintah menjadi kewenangan daerah

Sedangkan menurut penjelasan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yaitu penjelasan umum No. 6 menyebutkan bahwa: Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa : Kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan Daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut, dalam hal ini pada dasarnya Pemerintah menerapkan prinsip “uang mengikuti fungsi”.

Adanya kewenangan baru yang diberikan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah diharapkan mampu menggali sumber Pendapatan

Asli Daerah. Kebijakan tersebut merupakan pengejawantahan dari upaya pemerintah agar daerah dapat secara kreatif mencari peluang-peluang sumber investasi di luar daerah agar lumbung keuangan daerah dapat terpenuhi yang pada gilirannya urusan-urusan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

2.3. Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pendapatan (*revenues*) berbeda dengan *income*. *Revenues* merupakan pendapatan yang belum dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh pendapatan tersebut, sedangkan *Income* adalah pendapatan yang telah dikurangi dengan biaya-biaya untuk memperoleh pendapatan-pendapatan itu. *Income* lebih tepat diterjemahkan sebagai penghasilan.

Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Hasil pajak daerah
 - 2) Hasil retribusi daerah
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Dari ketentuan pasal tersebut di atas, maka pendapatan daerah dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Pendapatan Non Asli Daerah

Sampai saat ini yang termasuk Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri dan didapat melalui pajak daerah, retribusi daerah, BUMD, dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga..

2.3.1. Hasil Pajak Daerah

Pajak daerah termasuk sumber keuangan pokok bagi daerah di samping retribusi daerah. Pajak adalah iuran masyarakat kepada pemerintah berdasarkan undang-undang yang berlaku, guna membiayai pengeluaran pemerintah yang prestasinya kembali, tidak dapat ditunjuk secara langsung tetapi pelaksanaannya dapat dipaksakan. (Ibnu Syamsi, 1994: 201) Sedangkan pajak daerah itu sendiri menurut UU No. 34 Tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan.

Selanjutnya pada pasal 2 ayat (2) UU No 34 Tahun 2000, jenis pajak kabupaten atau kota terdiri dari:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Parkir

Dari jenis pajak, Kabupaten atau Kota dapat tidak memungut salah satu dari beberapa jenis pajak yang telah ditentukan apabila potensi pajak di daerah Kabupaten atau Kota tersebut dipandang kurang memadai.

Adapun penjelasan dari ketujuh jenis pajak kabupaten atau kota sebagai berikut :

- a. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel
Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu,

- dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
- b. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran
Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.
 - c. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan
Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan dan atau kesamaan dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga
 - d. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame
Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau mengujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
 - e. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah
 - f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - g. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran. (Pasal 2 ayat(2) UU No. 34 Tahun 2000)

Menurut Nick Devas (1989:61), tolak ukur untuk menilai pajak daerah sebagai berikut :

- 1) Hasil (*yield*) : memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya; stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu; dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi; pertumbuhan penduduk; dan sebagainya; juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut
- 2) Keadilan (*equity*) : dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang; pajak bersangkutan harus adil secara horisontal, artinya beban

pajak haruslah sama benar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama; harus adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar daripada kelompok yang tidak banyak memiliki sumberdaya ekonomi; dan pajak itu haruslah adil dari tempat ketempat, dalam arti hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari satu daerah kedaerah yang lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.

- 3) Daya guna ekonomi (*economic efficiency*) : pajak hendaknya mendorong atau setidaknya tidak menghambat penggunaan sumberdaya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi; mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung; dan memperkecil “beban lebih”
- 4) Kemampuan melaksanakan (*ability to implement*) : suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha
- 5) Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*suitability as a local revenues source*): ini berarti, haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak; tidak mudah dihindari; dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah kedaerah lain; pajak daerah jangan hendaknya mempertajam perbedaan-perbedaan antara daerah, dari segi potensi ekonomi masing-masing dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

2.3.2. Hasil Retribusi Daerah

Di samping pajak daerah, sumber pendapatan daerah dapat diperoleh melalui retribusi. Ibnu Syamsi (1994:201) mendefinisikan retribusi sebagai berikut :
Retribusi adalah iuran dari masyarakat tertentu (orang-orang tertentu) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang prestasinya dikembalikan ditunjuk secara langsung, tetapi pelaksanaannya tidak dapat dipaksakan meskipun tidak mutlak. Sedangkan menurut UU No. 34 Tahun 2000 retribusi dibagi tiga golongan, yaitu :

- a. Retribusi Jasa Umum.
Jasa yang dimaksud merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- b. Retribusi Jasa Usaha
Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah
- c. Retribusi Perijinan tertentu
Perijinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi
(Pasal 18 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2000)

Penetapan jenis-jenis Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perijinan tertentu dimaksudkan untuk tercipta ketertiban dalam penerapannya, sehingga dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata daerah yang bersangkutan.

2.3.3. Perusahaan Daerah

Pemerintah daerah juga diberikan hak untuk mengelola perusahaan sendiri sebagai salah satu sumber pendapatannya, yang disebut perusahaan daerah (Perusda).

Prinsip pengelolaan daerah haruslah bersifat profesional dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip ekonomi secara umum yaitu efisien. Secara umum perusahaan

daerah merupakan suatu badan usaha yang dibentuk oleh daerah untuk memperkembangkan perekonomian dan untuk menambah penghasilan daerah. Dari kutipan ini tergambar dua fungsi pokok yaitu sebagai dinamisator perekonomian daerah yang berarti harus mampu memberikan rangsangan bagi berkembangnya perekonomian daerah dan sebagai penghasil pendapatan daerah.

Salah satu maksud didirikannya perusahaan daerah adalah didasarkan pada pelayanan dan pemberian jasa kepada masyarakat. Namun demikian tidak berarti bahwa perusahaan daerah tidak dapat memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah. Perusahaan daerah mempunyai dua fungsi yang berjalan secara bersamaan, dimana satu pihak dituntut untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi sosial, yaitu memberikan pelayanan dan jasa kepada masyarakat dan dipihak lain perusahaan daerah menjalankan fungsi ekonomi yaitu memperoleh keuntungan dan kinerjanya. Keuntungan inilah yang diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi Pendapatan Asli Daerah.

Semakin banyak perusahaan daerah yang dikelola oleh daerah, maka semakin banyak pendapatan daerah yang didapatkan dari sektor ini. Oleh karena itu diperlukan penanganan yang baik serta profesional dalam menjalankan perusahaan daerah

2.3.4. Lain-lain Hasil Usaha Daerah Yang Sah

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah selain pajak, retribusi dan perusahaan daerah maka daerah berhak mendapatkan sumber daerah itu sendiri. Lain-lain usaha daerah yang sah merupakan usaha daerah (bukan usaha perusahaan daerah) dapat dilakukan oleh suatu aparat Pemerintah Daerah (dinas) yang dalam kegiatannya

menghasilkan suatu barang atau jasa yang dapat dipergunakan oleh masyarakat dengan ganti rugi.

Usaha daerah sebagai sumber pendapatan daerah harus disetorkan kepada kas daerah dan diatur dalam peraturan daerah. Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, Kabupaten/ kota melakukan berbagai upaya terobosan dalam peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah, sebab faktor dana sangat menentukan lancar tidaknya suatu pemerintah daerah. Pelayanan kepada masyarakat akan terlambat akibat terbatasnya kemampuan dalam bidang pendanaan. Dengan terbatasnya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak banyak yang dapat dilakukan dalam memberikan pelayanan maupun kemudahan bagi masyarakat.

2.4. Obyek Wisata

2.4.1. Pengertian Obyek wisata

Menurut Chafid Fandeli (2000: 58), obyek wisata adalah perwujudan daripada ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan. Sedangkan obyek wisata alam adalah obyek wisata yang daya tariknya bersumber pada keindahan sumber daya alam dan tata lingkungannya.

2.4.2. Jenis Obyek wisata

Penggolongan jenis obyek wisata akan terlihat dari ciri-ciri khas yang ditonjolkan oleh tiap-tiap obyek wisata. Dalam UU No. 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisata disebutkan bahwa obyek dan daya tarik wisata terdiri dari :

- 1) Obyek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna.
- 2) Obyek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan sejarah, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi dan tempat hiburan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, obyek wisata dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu wisata buatan manusia dan wisata alam. Pada dasarnya obyek wisata pantai Pangandaran ini mempunyai dua bagian tersebut karena selain memiliki laut dengan daya tariknya dan keindahan alam, juga didukung oleh berbagai hasil karya manusia yang dapat menarik wisatawan. Selain itu juga didukung oleh kondisi masyarakat setempat yang masih kental dengan upacara adat seperti hajat laut yakni, upacara yang dilakukan nelayan di Pangandaran sebagai perwujudan rasa terima kasih mereka terhadap kemurahan Tuhan YME dengan cara melarung sesajen kelaut lepas. Acara ini biasa dilaksanakan pada tiap-tiap bulan Muharam, dengan mengambil tempat di Pantai Timur Pangandaran. *Event* pariwisata bertaraf internasional yang selalu dilaksanakan di sini adalah Festival Layang-layang Internasional (*Pangandaran International Kite festival*) dengan berbagai kegiatan pendukungnya yang bisa kita saksikan pada tiap bulan Juni atau Juli yang ternyata cukup menarik minat wisatawan.

2.5. Pengembangan Obyek Wisata

Basis pengembangan pariwisata adalah potensi sumber daya keragaman budaya, seni, dan alam (pesona alam). Pengembangan sumber daya tersebut dikelola melalui pendekatan peningkatan nilai tambah sumber daya secara terpadu antara

pengembangan produk pariwisata dan pengembangan pemasaran pariwisata melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat lokal dalam rangka pengembangan pariwisata.

Tujuan program ini adalah mengembangkan dan memperluas diversifikasi produk dan kualitas pariwisata nasional yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, kesenian, dan kebudayaan, dan sumber daya alam (pesona alam) lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian seni dan budaya tradisional serta kelestarian lingkungan hidup setempat, mengembangkan dan memperluas pasar pariwisata terutama pasar luar negeri.

Berdasarkan hal diatas maka pembangunan kepariwisataan memiliki 3 fungsi atau tri-fungsi, yaitu :

1. Menggalakkan kegiatan ekonomi
2. Memelihara kepribadian bangsa dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan
3. Memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa, serta menanamkan jiwa semangat, dan nilai-nilai luhur bangsa dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional.

Di samping itu untuk tercapainya tri-fungsi tersebut diatas maka harus ditempuh 3 macam upaya atau tri-fungsinya, yaitu :

1. Pengembangan obyek dan daya tarik wisata
2. Meningkatkan dan mengembangkan promosi dan pemasaran, dan
3. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan kepariwisataan.

(Sunardi, 2001 : 46)

Indonesia memiliki peluang yang besar dalam pengembangan pariwisata. Hal ini dapat dirinci sebagai berikut :

1. Meskipun pernah terjadi krisis minyak dan resesi ekonomi yang berkepanjangan ternyata wisatawan terus meningkat jumlahnya tidak banyak berpengaruh,

2. Seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, anggaran untuk berlibur cenderung meningkat,
 3. Tersedianya waktu berlibur yang cukup panjang di negara-negara sumber wisatawan,
 4. Kemajuan teknologi dibidang transportasi dan komunikasi mendorong orang untuk bepergian jauh,
 5. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Asia Pasifik memberikan peluang bagi Indonesia untuk dikunjungi,
 6. Diversifikasi produk wisata akan memperluas lingkup pilihan untuk berlibur ke Indonesia,
 7. Tingkat sadar wisata masyarakat semakin meningkat. Hal ini akan dapat memberikan dukungan yang lebih nyata bagi pengembangan pariwisata,
 8. Aksesibilitas ke Indonesia semakin bertambah luas akan mendorong arus kunjungan wisatawan mancanegara,
 9. Semakin mantapnya pengaturan dan kelembagaan di bidang pariwisata akan mendukung pelaksanaan hal-hal yang berkaitan kerjasama lintas sektoral baik disektor pemerintah maupun swasta.
- (Wagito,2001 :8)

Menurut Salah Wahab (2003 : 110) ada dua hal yang dapat ditawarkan kepada wisatawan sehingga menarik wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata, dimana kedua hal tersebut dapat berupa alamiah atau buatan manusia, yaitu :

- a. Sumber-sumber alam
 - 1) Iklim: udara lembut, bersinar matahari, kering dan bersih.
 - 2) Tata letak tanah dan pemandangan alam: dataran, pegunungan yang berpanorama indah, danau, sungai, pantai, bentuk-bentuk yang unik, pemandangan yang indah, air terjun, daerah gunung berapi, gua dan lain-lain.
 - 3) Unsur rimba: hutan-hutan lebat, pohon-pohon langka, dan sebagainya.
 - 4) Flora dan fauna: tumbuhan aneh, barang-barang beragam jenis dan warna, kemungkinan memancing, berburu dan bersafari foto binatang buas, taman nasional dan taman suaka binatang buas dan sebagainya.
 - 5) Pusat-pusat kesehatan: sumber air mineral alam, kolam lumpur berkhasiat untuk mandi, sumber air panas alam untuk penyembuhan penyakit dan sebagainya.
- b. Hasil karya buatan manusia yang ditawarkan

Ada 5 (lima) kategori utama yang ditawarkan, yaitu :

- 1) Yang berciri sejarah, budaya dan agama :
 - a) Monumen-monumen dan peninggalan-peninggalan bersejarah dari peradaban masa lalu

- b) Tempat-tempat budaya seperti museum, gedung kesenian, tugu peringatan, perpustakaan, pentas-pentas budaya rakyat, industri seni kerajinan tangan dan lain-lain.
 - c) Perayaan-perayaan tradisional, pameran-pameran, eksibisi, karnaval, upacara-upacara adat, ziarah-ziarah dan sebagainya.
 - d) Bangunan-bangunan raksasa dan biara-biara keagamaan.
- 2) Prasarana-prasarana
- a) Prasarana umum yang meliputi :
Sistem penyediaan air bersih, kelistrikan, jalur-jalur lalu lintas, sistem pembangunan limbah, sistem telekomunikasi dan lain-lain.
 - b) Kebutuhan pokok pola hidup modern misalnya
Rumah sakit, apotik, bank, pusat-pusat pembelanjaan, rumah-rumah penata rambut, toko-toko bahan makanan, kantor-kantor pemerintahan (polisi, penguasa setempat, pengadilan dan sebagainya), toko-toko rokok, kedai-kedai obat, toko-tokoacamata, warung-warung surat kabar, toko-toko buku, bengkel-bengkel kendaraan bermotor, pompa-pompa bensin dan lain-lain.
 - c) Prasarana wisata yang meliputi :
 - (1) Tempat-tempat penginapan wisatawan : hotel, motel, pension, rumah susun, kamar keluarga yang disewakan, bangunan-bangunan wisata sosial (desa wisata, tempat-tempat kemah, tempat-tempat karavan, pondok remaja dan sebagainya), rumah-rumah katering (restoran, kedai-kedai minuman, rumahrumah makan sederhana, warung-warung sate dan sebagainya)
 - (2) Tempat- tempat menemui wisatawan
 - (a) Untuk pengurusan perjalanan
Agen-agen perjalanan, badan usaha perjalanan, usaha sewa- menyewa kendaraan serta agen-agen yang mengatur ekskursi dan jalan-jalan keliling kota
 - (b) Untuk menyampaikan informasi dan propaganda
Kantor-kantor penerangan wisata di pintu-pintu masuk suatu negara, kota atau daerah tertentu
 - Organisasi- organisasi lokal atau sekitarnya yang mengurus pariwisata
 - Komite-komite upacara perayaan-perayaan khusus
 - (3) Tempat-tempat rekreasi dan sport : fasilitas sport untuk musim dingin dan panas, fasilitas perlengkapan sport darat dan air dan lain-lain
- 3) Sarana pencapaian dan alat transportasi penunjang meliputi : pelabuhan udara, laut bagi negara-negara yang berbatasan dengan laut, sungai,atau danau multinasional, kereta api dan alat transportasi darat lainnya, kapal-kapal, sistem angkutan udara, angkutan di pegunungan dan lain-lain.
- 4) Sarana pelengkap : seperti halnya prasarana, ,maka sarana pelengkap ini berbeda menurut keadaan perkembangan suatu negara. Pada umumnya sarana ini meliputi gedung-gedung yang menjadi sumber produksi jasa-jasa yang cukup penting tetapi tidak mutlak diperlukan oleh wisatawan. Umumnya sarana pelengkap ini bersifat rekreasi dan hiburan seperti misalnya : gedung-gedung sandiwara,

bioskop, kasino, nightclub, kedai-kedai minum, warung-warung kopi, klub-klub dan lain-lain

- 5) Pola hidup masyarakat yang sudah menjadi salah satu khasanah wisata yang sangat penting. Cara hidup bangsa, sikap, makanan dan sikap pandangan hidup, kebiasaannya, tradisinya, adat istiadatnya, semua itu menjadi kekayaan budaya yang menarik wisatawan ke negara mereka. Hal ini berlaku khususnya bagi negara-negara sedang berkembang yang masyarakat tradisionalnya berbeda dari masyarakat tempat wisatawan itu berasal. Modal dasar yang penting lainnya yakni sikap bangsa dari negara tersebut terhadap wisatawan; keramah tamahan, keakraban, rasa suka menolong dan tidak bertindak mengeksploitasi dan lain-lain.

Rencana pengembangan Pariwisata Kabupaten Ciamis untuk kedepan tercantum dalam Rencana Strategis yang berlaku selama lima tahun . Rencana Strategis yang berlaku tahun 2004-2009 di dalamnya memuat visi dan misi sebagai berikut :

1. Visi :

Mewujudkan Kabupaten Ciamis menjadi daerah tujuan wisata

2. Misi :

- a. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam kepariwisataan
- b. Mengembangkan sumber daya manusia dalam kewirausahaan aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- c. Mengembangkan jaringan kemitraan kepariwisataan
- d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan dan memelihara warisan budaya daerah dalam memberikan nilai tambah kultur masyarakat yang bernilai tinggi
- e. Meningkatkan pembinaan grup seni budaya dan sastra sebagai daya tarik yang memiliki moral etika dan estetika tinggi

- f. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai sejarah dan terpeliharanya berbagai peninggalan budaya
- g. Terkendalinya berbagai kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Selain itu tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh dunia Kepariwisata Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

1. Tujuan

- a. Meningkatkan investasi dalam kepariwisataan
- b. Meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam usaha kepariwisataan
- d. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam berusaha di bidang pariwisata
- e. Meningkatkan omset pariwisata
- f. Mengembangkan pola kemitraan dalam kepariwisataan
- g. Meningkatkan pemenuhan pasar pariwisata baik lokal, regional, nasional, maupun global dengan tidak meninggalkan kultur budaya masyarakat lokal
- h. Meningkatkan peran serta budayawan dan sastrawan daerah dalam pengembangan seni budaya dan sastra
- i. Meningkatkan grup seni budaya dan sastra daerah dengan memiliki ijin formal
- j. Meningkatkan rasa memiliki terhadap nilai-nilai sejarah dengan terpeliharanya peninggalan nilai budaya
- k. Meningkatkan situasi yang kondusif dengan terkendalinya kerukunan berbagai aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

2. Sasaran

- a. Meningkatkan jumlah investasi dalam kepariwisataan
- b. Meningkatkan pelaku usaha masyarakat lokal dalam kepariwisataan
- c. Meningkatnya jumlah aparatur pemerintah yang memiliki pemahaman dan wawasan dalam kewirausahaan
- d. Meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki pemahaman dan wawasan dalam kewirausahaan
- e. Meningkatnya pendapatan para pelaku usaha pariwisata
- f. Berkembangnya jaringan pemasaran wisata
- g. Meningkatnya arus kunjungan wisata
- h. Berkembangnya usaha pariwisata yang berpola kemitraan
- i. Meningkatnya kualitas objek wisata yang berwawasan lingkungan dan kultur budaya lokal
- j. Meningkatnya daya tarik objek wisata dengan di dasari kultur budaya daerah
- k. Bertambahnya peran serta seniman, budayawan dan sastrawan
- l. Bertambahnya jumlah grup seni dan sanggar sastra
- m. Terwujudnya kultur masyarakat yang lebih baik dalam menggali nilai-nilai sejarah melalui pembinaan secara terkoordinir dengan instansi terkait
- n. Meningkatnya pengendalian berbagai aliran kepercayaan yang dapat diterima oleh lingkungan masyarakat

Agar tujuan dan sasaran di atas dapat tercapai maka kebijaksanaan yang diambil adalah :

1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk pengembangan kepariwisataan

2. Memberikan pembinaan dan fasilitasi kepada masyarakat lokal dalam kepariwisataan
3. Mengembangkan SDM aparatur bidang kewirausahaan
4. Mengembangkan SDM masyarakat bidang kewirausahaan
5. Memberikan bimbingan dan fasilitas bagi para pelaku usaha pariwisata
6. Memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada para pelaku seni budaya dan sastra
7. Menginventarisasi grup seni budaya dan sanggar sastra
8. Meningkatkan sumber daya manusia pelaksana petugas di lapangan dan mengsosialisasikannya kepada masyarakat
9. Meningkatkan pembinaan dan pengendalian terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Sedangkan program dan kegiatannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Program meningkatkan iklim investasi yang kondusif kepariwisataan dan kebudayaan, dengan kegiatan :
 - a. Mengikuti Diklat kepegawaian kepariwisataan dan kebudayaan dalam meningkatkan kepercayaan dan daya tarik investor
 - b. Mengikuti seminar kepariwisataan dan kebudayaan dalam meningkatkan kepercayaan dan daya tarik investor
 - c. Mengikuti kursus-kursus yang diselenggarakan Tingkat Propinsi Jawa Barat dan Tingkat Pusat
 - d. Mengadakan kerjasama dengan investor bertaraf regional, nasional dan internasional

- e. Menyebarluaskan informasi melalui media elektronik, media cetak, *leaflet*, dan *booklet*
2. Program pengembangan sumber daya manusia, dengan kegiatan :
 - a. Melaksanakan pembinaan, penataran, pelatihan, dan seminar bagi para pelaku wisata dan budaya
 - b. Mengadakan study banding ke wilayah lain
3. Program pembinaan pengembangan jaringan kemitraan, dengan kegiatan :
 - a. Mengadakan kerja sama dengan berbagai lembaga, dinas, instansi terkait yang bersifat regional, nasional, dan internasional
 - b. Mengadakan kerjasama dengan biro perjalanan, menyusun paket wisata dan mengadakan kerjasama dengan pihak swasta baik bertaraf regional, nasional, dan internasional
4. Program peningkatan pelaku budaya dan sastrawan daerah, dengan kegiatan :
 - a. Mengadakan pasangiri, lomba, festival dan helaran budaya di dalam event-event tertentu tingkat lokal, regional dan nasional
 - b. Mengadakan pentas seni dan budaya di tingkat Kabupaten, regional dan nasional
5. Program pembinaan pengembangan nilai seni dan budaya seta bahasa dan sastra daerah, dengan kegiatan :
 - a. Mengadakan inventarisasi grup seni dan budaya daerah
 - b. Mengadakan pembinaan bahasa dan sastra daerah
 - c. Mengadakan apresiasi sastra di daerah
6. Program peningkatan pengembangan rasa memiliki terhadap nilai-nilai sejarah dengan terpeliharanya nilai budaya, dengan kegiatan :

- a. Pembinaan terhadap pengelola peninggalan sejarah dan mengupayakan penambahan pembangunan museum
 - b. Penataan pemeliharaan dan pengamanan terhadap benda-benda cagar budaya
7. Program pembinaan kerukunan berbagai aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan kegiatan pembinaan terhadap para penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. (lihat lampiran 6)

Menurut Bambang Sunaryo (2000 : 27) di lihat dari makna ekonomi, pembangunan kepariwisataan nasional diharapkan mampu menggalakkan kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan sektor-sektor lain yang terkait, sehingga lapangan kerja, pendapatan daerah, pendapatan negara serta devisa dapat ditingkatkan melalui pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan nasional

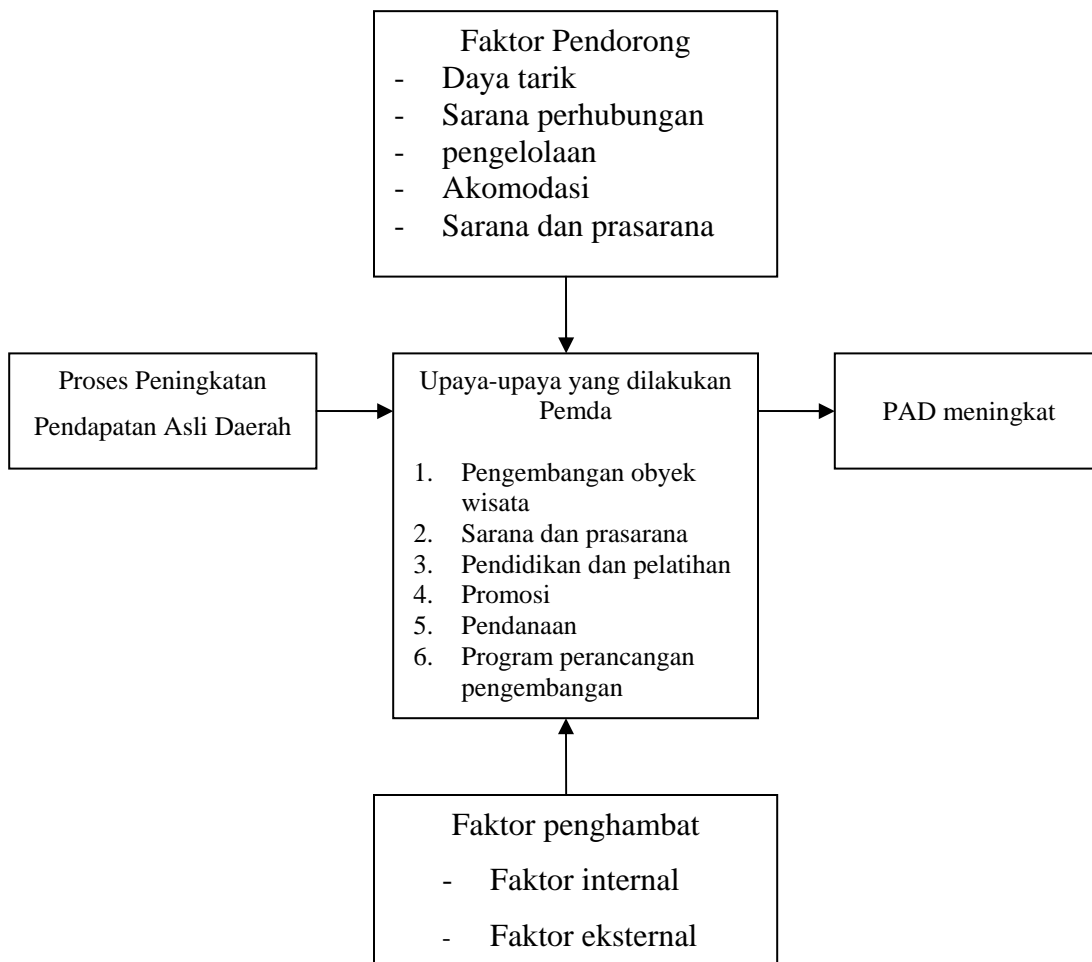
2.6. Kerangka Berfikir

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapat asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan gambaran potensi keuangan daerah yang pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah . Berkaitan dengan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, maka daerah dapat menggali potensi sumber daya alam yang berupa obyek wisata.

Pariwisata bukanlah merupakan sektor penyumbang terbesar dalam pendapatan daerah, tetapi berpotensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD). Dalam era globalisasi sekarang ini, bidang pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai peranan yang sangat strategis untuk menunjang

pembangunan perekonomian nasional. Untuk itulah maka ditempuh salah satu kebijakan, yaitu menggali, menginventarisir dan mengembangkan obyek-obyek wisata yang ada sebagai daya tarik utama bagi wisatawan.

Suatu daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Salah satu cara untuk meningkatkan PAD itu, salah satunya dengan mengembangkan potensi obyek wisata. Pengembangan disini yakni suatu proses, cara, perbuatan mengembangkan atau pembangunan secara bertahap dan teratur yang menjurus kepada sasaran yang dikehendaki. Pengembangan disini mengandung pengertian perbuatan mengembangkan obyek wisata yang dimiliki oleh daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Proses peningkatan Pendapatan Asli Daerah sangat berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat, sehingga dengan adanya upaya-upaya tersebut maka diharapkan Pendapatan Asli Daerah akan meningkat. Untuk lebih jelas kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat dalam bagan dibawah ini

BAGAN KERANGKA BERFIKIR

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Dasar Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor dalam bukunya Moleong (2002: 3) yang dimaksud penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian ini menyusun desain yang secara terus menerus disesuaikan dengan kenyataan di lapangan. Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk mengkaji atau membuktikan kebenaran suatu teori tetapi teori yang sudah ada dikembangkan dengan menggunakan data yang dikumpulkan.

3.2. Fokus Penelitian

Penentuan fokus suatu penelitian memiliki dua tujuan. Pertama penetapan fokus dapat membatasi studi, jadi dalam hal ini fokus akan membatasi bidang *inquiry*. Kedua penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau memasukan mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan. (Moleong : 2002 : 62)

Mengingat pentingnya fokus penelitian tersebut, maka yang dijadikan fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Ciamis dalam mengembangkan obyek wisata pantai Pangandaran, dengan indikator
 - a. Pengembangan obyek wisata pantai Pangandaran

- b. Sarana dan prasarana
 - c. Pendidikan dan pelatihan
 - d. Promosi
 - e. Pendanaan
 - f. Program perancangan pengembangan
2. Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat dalam upaya peningkatan PAD, dengan indikator
- a. Faktor pendorong
 - 1) Daya tarik
 - 2) Sarana perhubungan
 - 3) Pengelolaan
 - 4) Akomodasi
 - 5) Sarana dan prasarana
 - b. Faktor penghambat
 - 1) Faktor internal
 - 2) Faktor eksternal

Lokasi yang peneliti pilih adalah wilayah Kabupaten Ciamis dengan situs penelitian di Diparbud, dan obyek wisata pantai Pangandaran

3.3. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini adalah :

3.3.1. Informan

Informan merupakan sumber data yang berupa orang. Dalam penelitian ini yang dijadikan informan adalah Pejabat di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis yaitu : Drs Acep Rustandi, Bpk Mamat Surya Wijaya, Bpk Hendra Gunawan, Bpk Ridwan Koswara dan Bpk Oyo Bin Dion.(lihat lampiran 2).Dari beberapa informan diharapkan dapat terungkap kata-kata dan tindakan yang diharapkan. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama (Moleong, : 2002 : 112)

3.3.2. Dokumen

Dokumen ialah setiap bahan tertulis atau film. Sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku, dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi (Moleong, 2002: 160). Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah dokumen resmi, yaitu dokumen yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis. (lihat lampiran 4)

3.4. Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam rangka penelitian. Pada penelitian ini dalam proses pengumpulan data akan digunakan metode wawancara, dan dokumentasi

3.4.1. Wawancara (Interview)

Dalam penelitian ini teknik wawancara digunakan sebagai cara untuk mengumpulkan data. Menurut Moleong (2002 :135) menjelaskan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak,

yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Penggunaan metode wawancara dalam penelitian ini ditujukan untuk mengungkapkan data tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, faktor-faktor yang mendorong dan menghambat dalam upaya peningkatan PAD melalui pengembangan potensi obyek wisata pantai Pangandaran

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpulan data yang berupa pedoman wawancara yaitu instrumen yang berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara langsung kepada informan yaitu pejabat di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis. (lihat lampiran 1)

3.4.2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan melihat catatan tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan serta menjadi alat bukti yang resmi. Metode ini digunakan untuk mengungkap tentang besarnya potensi obyek wisata pantai Pangandaran dan Pendapatan Asli Daerah Pemda Kabupaten Ciamis.

Penggunaan metode dokumentasi ini ditujukan untuk melengkapi dan memperkuat data dari hasil wawancara, sehingga diharapkan dapat diperoleh data yang lengkap, menyeluruh dan memuaskan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa buku-buku, majalah, makalah, dokumen serta sumber lain yang relevan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pengembangan potensi obyek wisata pantai Pangandaran.

Jenis dokumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi yang berada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Diparbud) Kabupaten Ciamis seperti arsip, surat keputusan dan *booklet*. (lihat lampiran 9)

3.5. Objektivitas dan Keabsahan Data

Keabsahan data sangat mendukung dalam menentukan hasil akhir suatu penelitian. Oleh karena itu diperlukan suatu teknik pemeriksaan data. Teknik pemeriksaan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan dan perbandingan terhadap data itu. (Moleong, 2002: 178)

Dalam penelitian ini, teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi dengan sumber, ini berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Patton, 1987 :331). Hal ini dapat dicapai dengan jalan :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil data wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang dapat rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan

Akan tetapi dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan kelima-limanya untuk membandingkan. Peneliti hanya menggunakan perbandingan yaitu :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan

3.6. Metode Analisis Data

Analisis data menurut Patton dalam bukunya Moleong (2002 : 103), adalah proses mengatur urutan data mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian besar.

Analisis data didalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Miles dan Huberman dalam H. B. Sutopo, menyajikan dua model pokok proses analisis pertama, model analisis mengalir, dimana tiga komponen analisis (reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi) dilakukan saling menjalin dengan proses pengumpulan data dan mengalir bersamaan. Kedua, model analisis interaksi, dimana komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul, maka tiga komponen analisis (reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan) berinteraksi.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang merupakan proses penggambaran daerah penelitian.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 4 tahap yaitu :

3.6.1. Pengumpulan data

Peneliti mencatat semua data secara obyektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan interview di lapangan.

3.6.2. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. (Matthe B. Miles, : 1992 “)

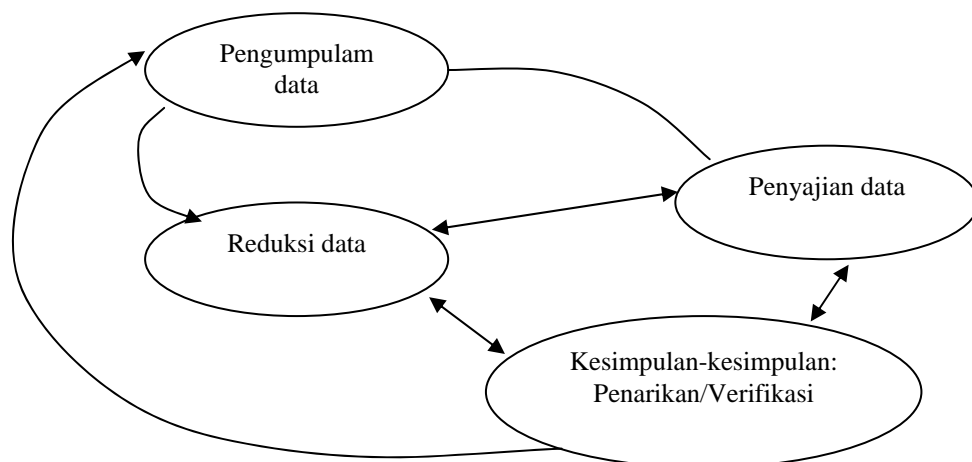
3.6.3. Sajian data

Sajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. (Matthe B. Miles, 1992 : 17)

3.6.4. Kesimpulan/ verifikasi data

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. (Matthe B. Miles, 1992 : 19). Dalam penarikan kesimpulan ini didasarkan pada reduksi data dan sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

Secara skematis proses pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan verifikasi data dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini



(Miles dan Huberman, 1992: 20)

3.7. Prosedur Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti membagi dalam empat tahap, yaitu tahap sebelum ke lapangan, pekerjaan lapangan, analisis data, dan penulisan laporan. Pada tahap pertama pra lapangan, peneliti mempersiapkan segala macam yang dibutuhkan atau diperlukan peneliti sebelum terjun dalam kegiatan penelitian, yaitu :

1. Menyusun rancangan penelitian
2. Mempertimbangkan secara konseptual-teknis serta logistik terhadap tempat yang akan digunakan dalam penelitian
3. Membuat surat izin penelitian
4. Latar penelitian dan dinilai guna serta melihat dan sekaligus mengenal unsur-unsur sosial dan keadaan alam pada latar penelitian
5. Menentukan informan yang akan membantu peneliti dengan syarat-syarat tertentu
6. Mempersiapkan perlengkapan penelitian
7. Dalam penelitian, peneliti harus bertindak sesuai dengan etika terutama berkaitan dengan tata cara peneliti berhubungan dengan masyarakat dan harus menghormati seluruh nilai yang ada di dalam masyarakat

Pada tahap kedua yaitu pekerjaan lapangan peneliti dengan bersungguh-sungguh dengan kemampuan yang dimiliki berusaha untuk memahami latar penelitian. Dengan segala daya, usaha serta tenaga yang dimiliki oleh peneliti dipersiapkan benar-benar dalam menghadapi lapangan penelitian

Tahap ketiga yaitu analisis data. Setelah semua data yang diperoleh di lapangan terkumpul maka peneliti akan mereduksi serta menyajikan data tersebut setelah ini dilakukan verifikasi data. Peneliti berusaha untuk mencari pola hubungan

serta hal-hal yang sering timbul. Setelah tahap analisis data selesai dan telah diperoleh kesimpulan, penulis masuk tahap keempat yaitu penulisan laporan. Dalam penulisan laporan peneliti sesuai dengan hasil yang diperoleh di lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Hasil Penelitian

1. Sumber Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sumber pendapatan daerah terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu :

- 1) Hasil pajak daerah
- 2) Hasil retribusi daerah
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan; dan

Yang dimaksud dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah antara lain penerimaan daerah diluar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah.

b. Dana Perimbangan; dan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan daerah yang sah antara lain hibah atau dana darurat dari pemerintah

2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No. 1 Tahun 2002 Tentang Perangkat Daerah, bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis adalah unsur pelaksana pemerintah daerah bidang kepariwisataan dan sebagian kewenangan bidang pendidikan dan kebudayaan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten (Diparbud) Ciamis mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan daerah bidang kepariwisataan dan sebagian kewenangan bidang pendidikan dan kebudayaan khususnya meliputi aspek yang terkait dengan sektor kebudayaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten (Diparbud) Ciamis mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pengelolaan kepariwisataan dan kebudayaan
- 2) Pelaksanaan fasilitasi pengelolaan kepariwisataan dan kebudayaan
- 3) Pelaksanaan perizinan dan pelayanan umum bidang kepariwisataan dan kebudayaan
- 4) Pembinaan terhadap Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- 5) Pelaksanaan tugas yang ditetapkan oleh Bupati

(Perda No. 1 Tahun 2000)

3. Potensi Kepariwisataaan Kabupaten Ciamis

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Barat yang terletak \pm 137 Km kearah selatan dari kota Bandung, dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya, sebelah timur berbatasan dengan Propinsi Jawa Tengah dan Kota Banjar, serta sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Kabupaten Ciamis memiliki 21 obyek wisata, 1 *rest area* (tempat transit), 1 penyebrangan *ferry* majingklak, 1 pusat kenelayanan Bojong Salawe dan Bandara Nusawiru yang terbentang mulai dari utara sampai selatan, dengan jenis obyek dan daya tarik wisata yang bervariasi mulai dari obyek wisata budaya, obyek wisata alam dan obyek wisata minat khusus.(Wawancara dengan Bapak Mamat Surya Wijaya sebagai Kasi pengembangan wisata pada tanggal 16 September 2004)

Potensi-potensi pariwisata di Ciamis merupakan obyek wisata yang mempunyai prospek cukup baik sebagai daerah tujuan wisata di Jawa Barat karena mempunyai potensi alam yang sangat mendukung.

Jenis obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Ciamis dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) jenis, yaitu :

- 1) Obyek dan daya tarik wisata budaya, terdiri dari: Situ Lengkong Panjalu, Astana Gede Kawali, Karang Kamulyan, Kampung Kuta, dan Situs Gunung Susuru

- 2) Obyek dan daya tarik wisata alam, terdiri dari : Pantai Pangandaran, Karapyak, Palatar Agung, Karang Nini, Lembah Putri, Karang Tirta, Batu Hiu, Batu Karas, Madasari, Keusik Luhur, dan Situ Mustika
- 3) Obyek dan daya tarik wisata minat khusus, terdiri dari : Curug Tujuh, Goa Donan, Cagar Alam Pananjung, Citumang, dan Cukang Taneuh/Green Canyon. (Wawancara dengan Bapak Mamat Surya wijaya sebagai Kasi pengembangan wisata pada tanggal 16 september 2004)

4. Perkembangan Obyek Wisata Pantai Pangandaran

Salah satu obyek wisata yang menjadi andalan Kabupaten Ciamis adalah obyek wisata pantai Pangandaran. Obyek wisata ini telah mulai dikelola secara tradisional sejak tahun 1970- an.

Perkembangan pengelolaan pantai Pangandaran yaitu:

- 1) Tahun 1970, pantai Pangandaran sudah ada, akan tetapi masih dikelola oleh desa setempat, yaitu Desa Pananjung
- 2) Tahun 1985, pengelolaan pantai Pangandaran diberikan kewenangannya ke Dinas Pariwisata dan kebudayaan (Diparbud) berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1985
- 3) Sejak saat itu pantai Pangandaran sudah dijadikan tempat tamasya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1986
- 4) Tahun 1993, pantai Pangandaran ditetapkan sebagai salah satu kawasan andalan di Priangan. (Wawancara dengan Bapak Hendra Gunawan, sebagai Kasi hiburan dan rekreasi pada tanggal 14 September 2004).

5. Letak dan Kondisi Fisik Pantai Pangandaran

Obyek wisata Pantai Pangandaran merupakan primadona obyek wisata pantai di Jawa Barat, terletak di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran dengan jarak \pm 92 Km dari kota Ciamis kearah selatan.

Berdasarkan dari data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Diparbud) Kabupaten Ciamis tahun 2003 luas kawasan wisata ini meliputi kurang lebih 136 Ha. Jalan yang menuju ke lokasi obyek wisata pantai Pangandaran dalam kondisi sudah baik dan sudah beraspal.

Wisatawan yang akan masuk ke lokasi obyek wisata pantai Pangandaran harus membayar karcis harga tanda masuk pengunjung sebesar Rp 2500,00 dengan perincian Rp 1800,00 untuk retribusi, Rp 200,00 untuk sampah dan Rp 500,00 untuk asuransi. Sedangkan untuk setiap kendaraan yang memasuki lingkungan obyek wisata dikenakan retribusi sebagai berikut:

- 1) Sepeda Motor sebesar Rp 500,00
- 2) Sedan/Jeep sebesar Rp 1000,00
- 3) Mobil Penumpang Sejenis sebesar Rp 1500,00
- 4) Mobil Penumpang Besar sebesar Rp 2000,00
- 5) Bus Kecil sebesar Rp 2000,00
- 6) Bus Sedang sebesar Rp 3000,00
- 7) Bus Besar sebesar Rp 4000,00

(Perda Kabupaten Ciamis No.9 Tahun 2003)

Fasilitas yang tersedia di obyek wisata pantai Pangandaran adalah *Toll Gate* dan penjualan karcis, lahan parkir, pasar wisata, hotel dan rumah makan,

kios cinderamata dan kios makanan dan minuman, MCK/ kamar mandi, bumi perkemahan, gedung kesenian, pelayanan telekomunikasi dan *money changer*, pasar ikan, *TIC (Tourist Information Centre)*, kantor pos, rumah sakit, sewa/rental perahu pesiar, sepeda, ban, papan selancar, jetski, *para sailing. Diving*, masjid dan mushola, tim penyelamat wisata pantai, tim SAR, pramu wisata, pasar tradisional, bioskop, tempat billiard.

Obyek wisata pantai Pangandaran dan lingkungan sekitarnya mempunyai kondisi alam yang masih alami dan asri. Flora yang dimiliki cukup beragam yang terdapat pada kawasan hutan yang masih asri, daerah konservasi terumbu karang serta taman laut.

Sedangkan berbagai jenis fauna yang ada adalah lutung, ular, biawak yang bisa didapatkan di daerah konservasi ujung Pananjung yang terletak diantara pantai barat dan pantai timur.

Berdasarkan data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Diparbud) Kabupaten Ciamis dari tahun 1998 sampai tahun 2003, jumlah wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata pantai Pangandaran tercatat sebanyak 8.846.698 orang, yang terdiri dari wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai jumlah pengunjung obyek wisata pantai Pangandaran dapat di lihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Pengunjung obyek wisata Pangandaran tahun 1998 sampai 2003

Tahun	Pengunjung	Perkembangan	Perubahan (%)
1998	1.307.839		
1999	819.986	(487.853)	(37,30)
2000	1.559.733	739.747	90,21
2001	1.514.414	(45.319)	(2,90)
2002	1.671.712	157.298	10,38
2003	1.973.014	301.302	18,02
Jumlah	8.846.698	665.175	78,41
Rata-rata	1.474.449	110.862	15,68

Sumber : Diparbud Kabupaten Ciamis

Dengan melihat tabel 1 tersebut diatas, dapat diketahui perkembangan pengunjung di obyek wisata pantai Pangandaran secara umum meningkat rata-rata 15.68% setiap tahunnya atau rata-rata pengunjung sebanyak 1.474.449 orang pertahunnya. Peningkatan yang cukup menonjol terjadi pada tahun 2000 yaitu sebesar 90,21% hal ini disebabkan karena kondisi politik yang sudah kondusif. Sedangkan penurunan yang cukup menonjol terjadi pada tahun 1999 yaitu sebesar 37,30% hal ini disebabkan karena kondisi politik nasional, dimana pada waktu itu menjelang Pemilihan Umum, sehingga banyak masyarakat yang turun kejalan untuk berkampanye.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Diparbud) sebagai pengelola obyek wisata yang berusaha melayani masyarakat melalui sarana rekreasi telah memperoleh pendapatan atas penyelenggaraan jasa pariwisata yang telah diberikan. Dengan demikian, yang dimaksud pendapatan obyek wisata pantai Pangandaran adalah jumlah pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan karcis

kepada para wisatawan yaitu berupa retribusi wisatawan dan parkir kendaraan wisatawan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pendapatan retribusi parkir di Obyek wisata pantai pangandaran dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :

Tabel 2. Pendapatan retribusi parkir pantai Pangandaran tahun 1998 sampai 2003

Tahun	Pendapatan parkir (Rp)	Perkembangan (Rp)	Perubahan (%)
1998	523.135.600		
1999	327.994.400	(195.141.200)	(37,30)
2000	623.893.200	295.898.800	90,21
2001	605.765.600	(18.127.600)	(2,90)
2002	668.684.800	62.919.200	10,38
2003	789.205.600	120.520.800	18,02
Jumlah	3.538.679.200	266.070.000	78,41
Rata-rata	589.779.867	44.345.000	15,68

Sumber Diparbud Kabupaten Ciamis

Dengan melihat tabel 2 tersebut diatas, dapat diketahui perkembangan retribusi parkir secara umum meningkat rata-rata 15,68% pertahunnya atau rata-rata sebesar Rp 589.779.867 pertahunnya

Pendapatan retribusi obyek wisata pantai Pangandaran yang paling tinggi adalah pada tiap tahunnya dipengaruhi oleh adanya hari libur bagi para pelajar dan Hari Raya Idul Fitri.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pendapatan retribusi obyek wisata pantai Pangandaran dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Pendapatan obyek wisata pantai Pangandaran tahun 1998 sampai 2003

Tahun	Pendapatan(Rp)	Perkembangan(Rp)	Perubahan (%)
1998	2.769.130.438		
1999	1.696.054.123	(1.073.076.315)	(38,75)
2000	3.122.085.424	1.426.031.301	84,07
2001	2.333.115.090	(788.970.334)	(25,27)
2002	2.631.528.782	298.413.692	12,79
2003	3.562.406.649	930.877.867	35,37
Jumlah	16.114.320.506	793.276.211	68,21
Rata-rata	2.685.720.083	132.212.701	13,64

Sumber : Diparbud Kabupaten Ciamis

Dengan melihat tabel 2 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa perkembangan pendapatan dari obyek wisata pantai Pangandaran secara umum meningkat rata-rata 13,64% pertahunnya atau rata-rata pendapatan sebesar Rp 2.685.720.083 pertahunnya. Peningkatan yang cukup menonjol terjadi pada tahun 2000 yaitu sebesar 84,07% hal ini disebabkan karena kondisi politik yang sudah kondusif. Sedangkan penurunan terjadi pada tahun 1999 yaitu sebesar 38,75% hal ini disebabkan karena kondisi politik nasional dimana pada waktu itu menjelang Pemilihan Umum, sehingga banyak masyarakat yang turun kejalan untuk berkampanye.

Kontribusi pantai Pangandaran terhadap Pendapatan Asli Daerah pertahunnya rata-rata sebesar Rp 2.685.720.083 atau 25,21% Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai prosentase pendapatan pantai Pangandaran terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini

Tabel 4. Prosentase kontribusi pantai pangandran terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan (Rp)	Prosentase (%)
1998	5.684.725.589	2.769.130.438	48,71
1999	8.973.521.056	1.696.054.123	18,90
2000	8.344.521.321	3.122.085.424	37,41
2001	12.781.513.019	2.333.115.090	18,25
2002	17.253.015.261	2.631.528.782	15,25
2003	27.856.974.088	3.562.406.649	12,78
Jumlah	80.894.270.334	16.114.320.506	151,30
Rata-rata	13.482.378.389	2.685.720.083	25,21

Sumber Diparbud Kabupaten Ciamis

Kenaikan dan penurunan pendapatan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu jumlah wisatawan serta besarnya tarif masuk wisatawan dan parkir kendaraan di obyek wisata. Bila jumlah wisatawan meningkat, maka pendapatan juga cenderung meningkat. Demikian juga jika tarif masuk wisatawan dari parkir kendaraan di obyek wisata naik maka pendapatan juga meningkat.

4.2. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam mengembangkan obyek wisata pantai Pangandaran

Obyek wisata pantai Pangandaran termasuk obyek wisata yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Ciamis. Sehingga dalam pengembangan obyek wisata itu sendiri merupakan tanggungjawab pemerintah Kabupaten yang dalam hal ini merupakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Diparbud) Kabupaten Ciamis.

Upaya pelaksanaan pembangunan/penyediaan sarana dan penataan lingkungan kepariwisataan di Kabupaten Ciamis diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan mengembangkan sarana/fasilitas disetiap obyek wisata
2. Meningkatkan penataan dan pengelolaan lingkungan obyek wisata

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengusaha jasa pariwisata
4. Meningkatkan minat investasi baik dari pihak pemerintah maupun pihak swasta yang bergerak di bidang pariwisata
5. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas/Instansi dalam penyelenggaraan pembangunan di obyek wisata

Mengacu kepada arah kebijakan diatas, maka sasaran kegiatan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Ciamis sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan dan pengembangan sarana/fasilitas di setiap obyek wisata
2. Terwujudnya peningkatan penataan dan pengelolaan lingkungan obyek wisata
3. Terciptanya respon masyarakat dan pengusaha jasa pariwisata dalam menciptakan lingkungan yang indah dan menarik
4. Terciptanya minat investasi baik dari pihak pemerintah maupun pihak swasta yang bergerak di bidang pariwisata
5. Terciptanya peningkatan koordinasi dengan Dinas/Instansi dalam penyelenggaraan pembangunan di obyek wisata

Agar sasaran tersebut dapat tercapai maka program yang diambil adalah :

1. Melengkapi sarana dan prasarana di setiap obyek wisata
2. Sosialisasi yang intensif terhadap para pelaku jasa usaha pariwisata untuk lebih mematuhi segala kewajibannya dalam melaksanakan usahanya
3. Sosialisasi Badan/Lembaga pemerintah dan swasta lingkup pemerintah Ciamis agar mengetahui pentingnya mendukung keberhasilan sektor kepariwisataan

4. Meningkatkan kerjasama dengan Biro perjalanan. Sekolah, kampus, perusahaan, Dinas, Instansi, lembaga, Badan pemerintah maupun swasta se Jawa

Dalam pengembangan obyek wisata pantai Pangandaran sendiri, pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Diparbud) Kabupaten Ciamis mempunyai beberapa program kedepan, diantaranya yaitu :

1. Meningkatkan sumber daya manusia pengelola kepariwisataan dengan melaksanakan pembinaan, penataran dan pelatihan bagi pengelola pariwisata
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan obyek wisata
3. Pembangunan untuk pengembangan sarana dan penataan lingkungan di obyek wisata, meliputi: mengoperasikan kembali gedung kesenian, pembangunan pos pengamanan pantai, pembangunan taman di sepanjang jalan/pinggir pantai serta penanaman pohon kelapa di sepanjang pantai
4. Sosialisasi pada Badan/ Lembaga pemerintah dan swasta lingkup pemerintah Kabupaten Ciamis agar mengetahui pentingnya mendukung keberhasilan sektor kepariwisataan
5. Sosialisasi yang intensif terhadap para pelaku jasa usaha pariwisata untuk lebih memahami segala kewajibannya dalam melaksanakan usahanya
6. Sosialisasi kepada masyarakat sekitar obyek wisata secara bertahap agar masyarakat memiliki kepedulian dan rasa memiliki terhadap obyek wisata pantai Pangandaran
7. Menekan angka kebocoran di obyek wisata melalui pembinaan terhadap para aparat pemerintah, masyarakat, dan pengusaha

8. Melaksanakan promosi baik melalui *booklet/leaflet*, mengikuti pameran, media massa, media elektronik maupun internet
9. Meningkatkan, melestarikan, mengembangkan seni budaya daerah
10. Meningkatkan penyelenggaraan *event* kepariwisataan dan budaya yang menarik bagi wisatawan

Sedangkan program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Diparbud) untuk mengembangkan obyek wisata pantai Pangandaran yang sudah terlaksana diantaranya adalah:

1. Pembangunan berbagai fasilitas wisata seperti pintu gerbang masuk obyek wisata, tempat penjualan karcis, tempat parkir, hotel, rumah makan dan cafe, panggung terbuka, gedung kesenian, pondok wisata, MCK/ kamar mandi, mesjid dan mushola, kios cinderamata, pasar ikan, kantor pos, rumah sakit, dan pasar tradisional
2. Pementasan seni di kawasan obyek wisata pantai Pangandaran untuk menarik minat wisatawan
3. Meningkatkan penyelenggaraan *event* kepariwisataan dan budaya yang menarik bagi wisatawan
4. Sosialisasi kebijakan pusat dan daerah kepada masyarakat dan pelaku usaha jasa pariwisata
5. Untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang pariwisata, pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Diparbud) di ikut sertakan dalam Diklat kepegawaian kepariwisataan, mengikuti seminar kepariwisataan, dan mengadakan study banding

6. Untuk promosi, pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Diparbud) telah melaksanakan promosi baik melalui media massa, media elektronik, *booklet/leaflet*, mengikuti seminar maupun internet
7. Untuk mengatasi kurang tertibnya pedagang kaki lima dengan tenda birunya, maka kegiatan yang dilakukan yaitu dengan cara pemindahan para pedagang kaki lima ke lokasi pasar wisata yang sengaja di bangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis sebanyak 896 kios
8. Rehabilitasi hutan mangrove yang telah rusak dan penanaman baru di lokasi yang belum ada secara bertahap
9. Untuk menanggulangi abrasi, maka dibangun pancang dan dermaga penahan abrasi di sepanjang pantai timur obyek wisata pantai Pangandaran

Apabila dibandingkan dengan kondisi sebelumnya maka obyek wisata pantai Pangandaran sudah mengalami perkembangan baik dari segi fisik maupun dari segi jumlah pengunjung yang pada akhirnya berpengaruh pada peningkatan pendapatan retribusinya. Kondisi obyek wisata pantai Pangandaran sebelum dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Diparbud) kurang terpelihara karena hanya dikelola oleh desa setempat yang baik dari segi dana maupun pengetahuan masih kurang. (Wawancara dengan Bapak Hendra Gunawan sebagai Kasi hiburan dan rekreasi pada tanggal 14 September 2004)

4.3. Faktor-faktor Yang Mendorong dan Menghambat Pengembangan Obyek Wisata Pantai Pangandaran

4.3.1. Faktor-faktor yang Mendorong Pengembangan Obyek wisata Pantai Pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari pengamatan langsung, wawancara, dan dokumen di obyek wisata pantai Pangandaran, maka peneliti mengidentifikasi hasil penilaian terhadap potensi obyek wisata.

1. Daya Tarik

Daya tarik utama yang ada di obyek pantai Pangandaran adalah :

- a. Pantainya yang landai dengan jarak pasang-surut dan surut relatif lama, memungkinkan untuk dilakukan kegiatan berenang, berperahu, dll
- b. Dapat melihat matahari terbit (*sunrise*) dan terbenam (*sunset*)
- c. Terdapat pantai dengan hamparan pasir putih
- d. Terdapat taman laut dan mengalirnya sungai Cirengganis yang dipercaya dapat membuat orang awet muda
- e. Memiliki cagar alam dengan flora dan fauna
- f. Terdapat goa alam dan buatan (pada jaman penjajahan Jepang)

Pada hari-hari tertentu di kawasan obyek wisata pantai Pangandaran dapat dijumpai berbagai macam atraksi wisata seperti : pertunjukan kesenian tradisional, hajatan laut, festival layang-layang, pemilihan putra-putri pariwisata, *helaran* dan pentas seni tradisional pada sekitar bulan Maret, Juni, dan Juli. (Wawancara dengan Bapak Ridwan Koswara sebagai pelaksana lapangan pada tanggal 21 September 2004)

2. Sarana Perhubungan

Jalan yang menuju ke lokasi obyek wisata pantai Pangandaran kondisinya sudah cukup baik karena sudah beraspal

Kendaraan umum yang melewati lokasi wisata jumlahnya cukup banyak karena ada trayek ke obyek wisata pantai Pangandaran. Rata-rata wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata pantai Pangandaran menggunakan kendaraan sendiri baik mobil maupun sepeda motor.

3. Pengelolaan, perawatan dan pelayanannya

Dalam pengelolaan, perawatan dan pelayanannya obyek wisata ini dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Diparbud) yang secara operasional dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pelayanan yang baik dan keramah tamahan dari pihak pengelola merupakan salah satu faktor yang penting dalam pariwisata, karena dengan adanya pelayanan yang baik tersebut maka wisatawan yang berkunjung akan merasa nyaman.

Pelayanan di lokasi kepada wisatawan cukup baik karena ada petugas yang ditunjuk untuk memandu wisatawan yang memerlukan penjelasan atau bantuan.

4. Akomodasi

Akomodasi yang tersedia di obyek wisata pantai Pangandaran berupa tempat untuk istirahat para wisatawan. Hotel di sekitar lokasi sudah ada sehingga bagi wisatawan yang ingin menginap dapat menginap di hotel yang ada di lokasi obyek wisata. Hotel yang tersedia berjumlah 32, seperti : hotel Surya

Pesona, hotel Puri indah, hotel Karang sari Hotel Bulak laut, dll (lihat lampiran 9)

5. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di obyek wisata berupa *toll gate* dan tempat penjualan karcis, lahan parkir, pasar wisata, hotel dan rumah makan, kios cinderamata, kios makanan dan minuman, MCK/ kamar mandi, bumi perkemahan, gedung kesenian, pelayanan telekomunikasi dan *money changer*, pasar ikan, *TIC (tourist information centre)*, rumah sakit, sewa/ rental perahu pesiar, sepeda, ban, papan selancar, jetski, *para sailing, diving*, mesjid dan mushola, tim penyelamat wisata pantai, tim SAR, pramuwisata, dan pasar tradisional.

Fasilitas yang tersedia di obyek wisata belum optimal karena memerlukan biaya yang cukup mahal untuk memperbaiki maupun untuk penyediaannya.

Air bersih yang ada di obyek wisata pantai Pangandaran berasal dari sumur. Penggunaan air bersih terutama untuk keperluan MCK wisatawan. Di samping itu, tersedianya air bersih di kawasan obyek wisata juga untuk mencukupi kebutuhan air bersih bagi yang bertempat tinggal di sekitar atau di dekat obyek wisata.

4.3.2 Faktor-faktor yang Menghambat Pengembangan Obyek Wisata Pantai Pangandaran

Dari hasil wawancara dengan Bapak Mamat Surya wijaya sebagai Kasi pengembangan wisata pada tanggal 16 September 2004 diperoleh keterangan

tentang faktor-faktor yang menghambat pengembangan obyek wisata pantai Pangandaran sebagai berikut:

1. Faktor internal, yaitu :
 - a. Sarana dan prasarana yang belum memadai (arena bermain untuk anak-anak) khususnya di obyek wisata
 - b. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang pariwisata dan kebudayaan masih kurang
 - c. Kesadaran sebagian para pengusaha usaha jasa pariwisata dan masyarakat masih rendah
 - d. Masih terdapatnya lahan tidur potensial yang belum dimanfaatkan untuk pengembangan pariwisata dan kebudayaan
 - e. Kerusakan pesisir pantai akibat abrasi yang disebabkan oleh rusaknya hutan mangrove
 - f. Kurang indahnya obyek wisata karena tidak tertibnya pedagang kaki lima dengan tenda birunya
 - g. Masih terbatasnya dana infrastruktur di kawasan
2. Faktor eksternal, yaitu :
 - a. Adanya persaingan yang semakin ketat dengan daerah lain di luar Kabupaten Ciamis
 - b. Menurunnya ekonomi masyarakat akibat krisis moneter
 - c. Meningkatnya pengaruh luar yang mempengaruhi, sehingga menyebabkan melemahnya budaya daerah

- d. Kultur masyarakat yang kurang mendukung terhadap percepatan pengembangan obyek dan daya tarik wisata
- e. Adanya penyusupan pengunjung melalui jalan masuk perkebunan PT Start Trust, hal ini terjadi karena masih kurangnya kesadaran dari para pengunjung untuk membayar retribusi
- f. Masih kurang sadarnya lembaga-lembaga swasta terhadap sarana dan prasarana kepariwisataan

4.4 Pembahasan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan.

Penerimaan daerah kabupaten Ciamis berasal dari sisa anggaran tahun sebelumnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagian dana perimbangan, bagian pinjaman daerah, dan bagian lain-lain penerimaan yang sah. Adapun pengeluaran daerah kabupaten Ciamis terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dari hasil penelitian di atas dapat dilihat bahwa pengembangan obyek wisata pantai Pangandaran berpotensi dalam ikut mendukung Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis, walaupun tidak terlalu besar. Kontribusi pantai Pangandaran terhadap Pendapatan Asli Daerah rata-rata sebesar 25,21% pertahunnya atau rata-rata sebesar Rp 2.685.720.083 pertahunnya. Retribusi parkir rata-rata meningkat sebesar 15,68% pertahunnya atau rata-rata sebesar Rp 589.779.867 pertahunnya. Hal ini didukung oleh meningkatnya jumlah pendapatan retribusi obyek wisata pantai Pangandaran yang rata-rata meningkat sebesar 13,64% pertahunnya atau rata-rata sebesar Rp 2.685.720.083 pertahunnya

Akan tetapi, pendapatan retribusi dari obyek wisata pantai Pangandaran sangat dipengaruhi oleh jumlah pengunjung. Semakin besar jumlah pengunjung obyek wisata maka pendapatan retribusi dari obyek tersebut akan ikut naik. Dilain pihak, besar kecilnya upaya yang dilakukan oleh pihak pengelola terhadap obyek tersebut. Dalam hal ini, pihak pengelola obyek wisata harus mampu mengemas obyek wisata sedemikian rupa agar layak untuk dijual.

Faktor pendorong dalam pengembangan obyek wisata pantai Pangandaran yang terdiri dari pantainya yang landai dengan jarak pasang-surut dan surut relatif lama, memungkinkan untuk dilakukan kegiatan berenang, berperahu, pesona matahari terbit dan tenggelam, pantai dengan hamparan pasir putih, terdapat taman laut dan mengalirnya sungai Cirengganis, cagar alam dengan flora seperti kawasan hutan yang masih asri, terumbu karang dan taman laut sedangkan fauna yang ada seperti lutung, biawak, ular, serta goa alam dan buatan serta kegiatan nelayan mencari ikan sebisa mungkin dimanfaatkan untuk menarik minat wisatawan. Hal ini harus didukung oleh

sarana dan prasarana yang menuju obyek wisata, tempat parkir, MCK/ Kamar mandi, mushola, hotel dan rumah makan, kios cinderamata, dan ketersediaan air bersih. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang mendukung, wisatawan akan enggan untuk datang karena merasa kurang nyaman. Selain itu budaya masyarakat setempat seperti *helaran* dan seni tradisional dan upacara hajat laut harus tetap dilestarikan untuk menambah daya tarik wisatawan.

Apabila dikaji dari teori yang dikemukakan oleh Salah Wahab (2003: 110) pengembangan obyek wisata pantai Pangandaran ada yang sudah sesuai dengan teori, ada juga yang belum sesuai. Yang sudah sesuai misalnya adalah iklim yang mendukung seperti suhu udara yang berkisar antara 20- 32 C, cahaya matahari yang cukup, dan udara yang masih bersih bebas dari polusi. Adanya fenomena alam yang mempesona yaitu pantai yang landai dengan air yang jernih serta antara jarak pasang dan surut relatif lama, terdapat pantai dengan hamparan pasir putih, dan taman laut dengan ikan-ikan dan kehidupan laut yang mempesona serta pesona matahari terbit dan tenggelam

Flora dan fauna juga terdapat di kawasan obyek wisata pantai Pangandaran, yang terdapat pada kawasan hutan yang masih asri, daerah konservasi terumbu karang serta taman laut. Sedangkan fauna yang dapat dijumpai di daerah konservasi ujung Pananjung yang terletak diantara pantai barat dan pantai timur. Hal diatas yang berkaitan dengan sumber-sumber alam.

Hasil karya manusia yang ada di kawasan obyek wisata pantai Pangandaran yang berciri budaya adalah perayaan hajat laut pada sekitar bulan Maret, Juni, dan Juli. Sedangkan bangunan-bangunan yang berciri sejarah, budaya dan agama seperti

gedung kesenian sudah ada sedangkan museum, tugu peringatan, serta biara-biara keagamaan belum ada di kawasan obyek wisata pantai Pangandaran

Segi prasarana umum yang meliputi penyediaan air bersih, kelistrikan, jalur-jalur lalu lintas sudah tersedia. Yang belum di berdayakan adalah sistem pembuangan limbah yang baik. Hal ini berakibat banyaknya sampah yang masih berserakan di lokasi pantai yang terbawa oleh ombak pada saat pasang, sampah tersebut sebagian besar terbawa oleh aliran sungai. Sistem komunikasi yang tersedia yaitu: 1 warnet, 1 kantor telepon dan 10 wartel.

Segi kebutuhan pokok pola hidup modern seperti rumah sakit, apotik, bank, pusat-pusat perbelanjaan, rumah-rumah penata rambut, toko-toko bahan makanan sudah tersedia walaupun agak jauh dari kawasan obyek wisata.

Segi prasarana wisata yang meliputi hotel, motel, pension, rumah susun, atau kamar keluarga yang disewakan sudah tersedia di kawasan obyek wisata. Selanjutnya tempat-tempat menemui wisatawan untuk pengurusan perjalanan seperti agen-agen perjalanan, badan usaha perjalanan atau usaha sewa menyewa kendaraan sudah tersedia di Tasikmalaya seperti Bis Budiman, Sony, Sari Bakti Utama. Sedangkan untuk menyampaikan informasi dan propaganda seperti kantor-kantor wisata hanya ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Diparbud) Kabupaten Ciamis.

Segi sarana pencapaian dan alat transportasi penunjang yang meliputi pelabuhan udara dan laut yang terdekat hanya di kota Ciamis. Transportasi yang mencapai kawasan obyek wisata adalah melewati darat dengan kendaraan roda empat atau roda dua, melewati laut juga bisa dengan melalui pelabuhan Majingklak dan Pelabuhan Santolo di Kecamatan Kalipucang

Segi pola hidup masyarakat yang sudah menjadi salah satu khasanah wisata yang sangat penting yaitu cara hidup misalnya bergaya hidup yang sederhana, sika yang santun, ramah gotong royong, makanan dan pandangan hidup, kebiasaannya, tradisinya, adat istiadatnya seperti sedekah laut di kawasan obyek wisata pantai Pangandaran cukup menarik karena masyarakat di sekitar memiliki kebiasaan, tradisi, sikap pandangan hidup dan adat istiadat yang unik yang belum tentu dapat dijumpai di wilayah lain.

Pihak pengelola selain harus memperhatikan faktor pendorong juga harus memperhatikan faktor penghambat pengembangan obyek wisata pantai Pangandaran seperti faktor internal yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai, khususnya di obyek wisata. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sebagian para pengusaha usaha jasa pariwisata dan masyarakat masih rendah., sehingga belum mampu berpartisipasi aktif dalam memberdayakan obyek wisata pantai Pangandaran. Mereka perlu diberi pembinaan mengenai kepariwisataan dan pelatihan. Selama ini pembinaan kepada para pengusaha usaha jasa pariwisata dan masyarakat disekitar obyek wisata kurang rutin sehingga hasilnya kurang maksimal. Selain itu masih terdapat lahan tidur yang potensial yang belum dimanfaatkan serta terjadinya kerusakan pesisir pantai akibat abrasi yang disebabkan oleh rusaknya hutan mangrove.

Selain faktor internal, pihak pengelola juga harus memperhatikan faktor eksternal yaitu: Adanya daya saing yang semakin ketat dengan daerah lain di luar Kabupaten Ciamis. Hal ini menimbulkan daya saing yang semakin ketat, apabila sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pengelola kurang maka akan mengakibatkan berkurangnya pengunjung ke obyek wisata. Selain itu adanya pengaruh luar yang

mempengaruhi sehingga menyebabkan melemahnya budaya daerah, padahal dengan adanya budaya daerah tersebut akan mendukung untuk menarik minat wisatawan.

Selama ini upaya yang dilakukan oleh pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Diparbud) selaku pengelola obyek wisata pantai Pangandaran sudah cukup baik walaupun perlu ditingkatkan. Seperti misalnya peningkatan kualitas SDM pengelola obyek wisata agar lebih profesional dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan. Selain itu promosi juga harus lebih ditingkatkan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian tentang peningkatan pendapatan asli daerah melalui pengembangan potensi obyek wisata pantai Pangandaran maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan oleh pihak pengelola yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Diparbud) Kabupaten Ciamis untuk mengembangkan obyek wisata pantai Pangandaran adalah :
 - a. Untuk mengatasi kurang tertibnya pedagang kaki lima dengan tenda birunya, maka kegiatan yang dilakukan adalah dengan cara pemindahan para pedagang kaki lima kelokasi pasar wisata yang telah dibangun oleh Pemerintah daerah Kabupaten Ciamis sebanyak 896 kios
 - b. Untuk mengatasi abrasi laut maka pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Diparbud) membangun pancang dan dermaga penahan abrasi di sepanjang pantai timur obyek wisata pantai Pangandaran
 - c. Untuk mengatasi rusaknya hutan mangrove, maka dilakukan rehabilitasi dan penanaman pohon baru dilokasi yang belum ada secara bertahap
 - d. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan pelaku usaha jasa pariwisata agar memiliki kepedulian dan rasa memiliki terhadap obyek wisata pantai Pangandaran
 - e. Untuk meningkatkan SDM tenaga kerja maka pihak dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Diparbud) memberikan Diklat kepegawaiaan kepariwisataan, mengikuti seminar, dan mengadakan study banding

2. Faktor yang mendorong pengembangan obyek wisata pantai Pangandaran diantaranya adalah: adanya daya tarik yang dimiliki oleh pantai Pangandaran, sarana hubungan yang baik, pengelolaan oleh pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Diparbud), adanya akomodasi yang cukup baik dan sarana prasarana wisata yang memadai. Sedangkan faktor penghambatnya terdiri dari adanya kurang tertibnya pedagang kaki lima, abrasi laut, rusaknya hutan mangrove, kurangnya rasa kepedulian dari masyarakat dan pelaku usaha jasa pariwisata dan tenaga kerja yang profesional.
3. Kontribusi dari obyek wisata pantai Pangandaran untuk pendapatan asli daerah masih kecil walaupun tiap tahunnya hampir selalu mengalami peningkatan

5.2 Saran

1. Bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Diparbud): dalam penggalian dan pengembangan potensi obyek wisata pantai Pangandaran hendaknya memperhatikan faktor fisik supaya tidak merusak keseimbangan alam serta dalam pengembangan potensi obyek wisata seoptimal mungkin sehingga dapat mendukung pendapatan asli daerah Kabupaten Ciamis
2. Bagi pengelola: dalam mengelola obyek wisata hendaknya lebih ditingkatkan keprofesionalnya, misalnya dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan sehingga dapat meningkatkan kualitas potensi daya tarik wisata
3. Bagi wisatawan: Apabila mengunjungi obyek wisata hendaknya mematuhi peraturan atau himbauan yang ada di pantai Pangandaran

DAFTAR PUSTAKA

- Devas, Nick. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Fandeli, Chafid. “Potensi Obyek Wisata Alam Indonesia” Dalam: Fandeli, Chafid (Ed) 2001. *Dasar-dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Yogyakarta: Liberty
- Huberman, Michael dan Miles, B. Matthew. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Joyosuharto, Sunardi, “Aspek Ketersediaan (Supply) dan Tuntutan Kebutuhan (Demand) Dalam Pariwisata” Dalam: Fandeli, Chafid (Ed) 2001. *Dasar-dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Yogyakarta: Liberty
- Moleong, Lexy. J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Musanef, 1995. *Manajemen Usaha Pariwisata di Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung
- Rahman, Maman. 1999. *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian*. Semarang: IKIP Semarang Press
- Sitamorang, Victor, M. 1994. *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sukahar, Anthon, ‘Ekosistem Pesisir Karakteristik dan Prospeknya Untuk Pembangunan Kepariwisata Alam’, dalam: Fandeli, Chafid (Ed) 2001. *Dasar-dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Yogyakarta : Liberty
- Sunaryo, Bambang, ‘Strategi Pemasaran Pariwisata,’ dalam Fandeli, Chafid (Ed) 2001. *Dasar-dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Yogyakarta: Liberty
- Syamsi, Ibnu. 1994. *Dasar-dasar Kebijakanaksanaan Keuangan Negara*. Jakarta: Bina Aksara
- Wagito, “Kebijaksanaan Pembangunan Pariwisata Nasional Indonesia,” dalam: Fandeli, Chafid (Ed) 2001. *Dasar-dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Yogyakarta: Liberty
- Wahab, Salah. 2003. *Manajemen Kepariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita
- _____. UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah

_____. UU No. 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004

_____. UU No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

_____. UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah